

DANA DESA – ALOKASI

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 52, BD 2025/NO. 100, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 52 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, diperlu peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019.

- Perbup ini mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa (ADD) setiap desa tahun anggaran 2026, hal mana ADD ini diperuntukan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, sosial, budaya ketentraman dan ketertiban dan pengembangan sumber daya manusia. Perbup ini juga mengatur mengenai pengalokasian, pembagian, penganggaran, penggunaan, penyaluran ADD, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan sanksi. Pembagian besaran ADD dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot pembagian berdasarkan asas merata sebesar 70% dan berdasarkan asas keadilan sebesar 30%.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.

- Dalam hal Desa tidak membuat dan/atau tidak dapat melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya disebabkan adanya pergantian pejabat kepala Desa, Camat meminta keterangan tertulis kepada kepala Desa.

- Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berdampak terhadap APBD.

- Lamp : 23 Hlm.